

Korban Bencana Dibebeaskan dari Tagihan Listrik

Dana cadangan bencana masih tersisa Rp 930 miliar.

JAKARTA — PT PLN akan membebaskan seluruh korban bencana alam di sekitar Gunung Merapi, Kepulauan Mentawai, dan Wasior, Papua Barat, dari tagihan listrik. "Kami tidak akan menerbitkan rekening para korban bencana," kata Manajer Komunikasi PT PLN Bambang Dwiyanto kemarin.

Pelanggan yang tertimpa musibah di wilayah Merapi dan Mentawai tidak perlu membayar tagihan listrik bulan depan. Adapun di Wasior, PLN Area Pelayanan Papua telah menghapus tagihan sejak bulan lalu.

PLN masih mendata jumlah pelanggan korban bencana di Merapi dan Mentawai. Bambang memper-

kirakan, di wilayah sekitar Gunung Merapi terdapat sekitar 30 ribu pelanggan. Bila asumsi rekening minimum atau pemakaian di bawah 40 jam yang digunakan, tagihan yang dihapus mencapai Rp 900 juta.

Manajer PLN Area Borobudur Irwan Handri Rahmadi pada Rabu lalu mengaku sedang mendata pelanggan yang terpaksa mengungsi akibat erupsi Gunung Merapi. Untuk wilayah Borobudur, ia menghitung ada sekitar 23 ribu pelanggan yang terpaksa mengungsi.

Selain di wilayah Borobudur, letusan Gunung Merapi sejak 26 Oktober silam mengganggu jaringan listrik di Area Pelayanan dan Jaringan PLN Magelang, Yogyakarta, serta Klaten. Kerusakan, menurut Manajer Area Pelayanan dan Jaringan PLN Magelang Purwadi, sama dengan yang terjadi pada PLN Area Borobudur.

Buntutnya, PLN terpaksa melakukan pemadaman sekitar 8.000 dari 580 ribu pelanggan PLN Magelang. Namun kerusakan kali ini tidak separah akibat gempa Yogyakarta pada 2006.

Asisten Manajer PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan Klaten Djuremi mengatakan jumlah trafo yang rusak akibat debu vulkanik mencapai 23 unit. Harga setiap unitnya sekitar Rp 25 juta. Akibatnya, aliran listrik terhadap 1.500 pelanggan PLN di wilayah Klaten terganggu.

Sementara itu, meski Merapi masih berstatus "awas", dana penanggulangan bencana pemerintah daerah makin menyusut. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Utoyo mengatakan dana yang tersisa tinggal Rp 2 miliar. Ini hanya cukup untuk menghidupi pengungsi empat hingga lima hari.

Namun Wakil Menteri Keuangan

Anny Ratnawati menyatakan dana cadangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun ini masih tersisa banyak, yaitu Rp 930 miliar. Dalam APBN tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 3,79 triliun untuk penanggulangan bencana. Adapun untuk tahun depan, jumlah yang dianggarkan naik menjadi Rp 4 triliun.

Dari jumlah itu, Rp 650 miliar sudah dialokasikan untuk penanganan bencana di Sumatera Barat dan Jawa Barat beberapa bulan lalu. Pemerintah juga sudah menyalurkan dana siap pakai tahap II kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp 150 miliar. Selain itu, beberapa dana masih dalam proses persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat, di antaranya untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemeliharaan ternak.

● SORTA TOBING | GUSTIDHA BUDIARTIE | AHMAD RAFIQ | EVANA DEWI | DEWI RINA

TNI Minati F-16 Bekas Hibahan Amerika

JAKARTA — Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan senang jika TNI memperoleh 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat, meski semuanya pesawat bekas. Ia tak memperlakukan usia pesawat karena, kata dia, jika diganti mesin baru, kemampuan tempurnya meningkat.

"Kami mendorong agar itu bisa dibeli," katanya di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, kemarin se usai upacara melepas Kontingen Garuda ke Lebanon. Ia menjelaskan, TNI dan pemerintah mengkaji tawaran dari negeri adidaya itu. Agus berharap dalam waktu dekat sudah muncul keputusan. Panglima juga tak khawatir atas embargo suku cadang yang pernah dilakukannya pada 1999.

Presiden Amerika Barack Hussein Obama menawarkan hibah 24 pesawat tempur F-16 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dua hari lalu. Hibah dilakukan setelah pesawat diperbaiki. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal I Wayan Midhio, menyatakan setuju menerima tawaran Obama itu.

Namun Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq menolak. "Jangan sampai Amerika Serikat bingung buang sampah, dan kita siap menerima," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini kemarin. Menurut dia, biaya perbaikan 24 pesawat itu bisa menjadi mahal atau setara dengan membeli enam pesawat baru sejenis.

Padahal pemerintah dan DPR sepakat mulai 2010 memodernisasi alat utama sistem persenjataan. Mahfudz menyarankan pemerintah membeli pesawat F-16 baru secara bertahap seperti ketika membeli Sukhoi dari Rusia.

Anggota Dewan dari Fraksi Golkar, Tantowi Yahya, juga menolak. "Komitmen Komisi I untuk meningkatkan anggaran pembelian senjata sangat nyata, pemerintah tak usah khawatir," ucapnya.

Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani, menyarankan agar tawaran Obama diterima. Tapi mesti dipastikan suku cadang dan perawatannya dalam satu paket. Pemerintah pun harus memperhatikan kondisi pesawat dan varian alat utama sistem persenjataan. "Sementara pakai itu dulu sampai uang kita cukup untuk beli pesawat baru," katanya.

● MAHARDIKA SATRIA HADI | DIANING SARI | ISMA SAVITRI | JOBBIE S



ARIF WIBOWO (TEMPO)

Pencarian

Kendaraan *hagglunds* (amfibi) milik Palang Merah Indonesia menyisir kawasan Dusun Jetis Sumur, Cangkringan, Sleman, dalam pencarian korban letusan Merapi, kemarin.

Soeharto dan Gus Dur Tak Lolos Seleksi Pahlawan

JAKARTA — Bekas presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid tidak lolos seleksi sebagai penerima gelar Pahlawan Nasional. Kemarin di Istana Negara, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menganugerahkan gelar pahlawan kepada Dr Johannes Leimena dan Johannes Abraham Dimara.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Djoko Suyanto mengatakan Abdurrahman Wahid dan Soeharto belum lolos meski secara teknis dan administrasi sudah memenuhi syarat umum serta khusus. Ia tak memencinci alasan ketaklulusan kedua tokoh tersebut. "Semua sudah dibahas," katanya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta,

kemarin.

Djoko menuturkan, tujuh anggota Dewan mendiskusikan secara mendalam 10 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional, tanda kehormatan, dan tanda jasa usulan Kementerian Sosial. Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (Jawa Barat), Habib Sayid al-Jufrie (Sulawesi Tengah), Soeharto (Jawa Tengah), Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Andi Depu (Sulawesi Barat), Johannes Leimena (Maluku), Abraham Dimara (Papua), Andi Makkasau (Sulawesi Selatan), Pakubuwono X (Jawa Tengah), dan Sanusi (Jawa Barat).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menilai

perlu keberanian pemerintah untuk menetapkan gelar pahlawan kepada Abdurrahman dan Soeharto. "Pemerintah mungkin khawatir dengan pro dan kontranya," ujarnya.

Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bagi warga NU, Gus Dur—panggilan Abdurrahman—dianggap sebagai wali. "Lebih tinggi ketimbang Pahlawan Nasional," ujarnya di Surabaya. Bekas Menteri Pemberdayaan Perempuan ini yakin Gus Dur tak terpilih karena pengajuannya bersamaan dengan Soeharto.

Leimena adalah pendiri Partai Kristen Indonesia dan mantan Wakil Perdana Menteri II. Pria kelahiran Ambon, 6 Maret 1905, ini me-

ninggal di Jakarta pada 29 Maret 1971. Johannes Abraham Dimara lahir di Papua pada 16 April 1916. Dimara terlibat aksi pengibaran bendera Merah Putih dan melucuti pasukan polisi Belanda di Kepulauan Namlea, Maluku, pada April 1946.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 TK/2010, selain menganugerahkan dua gelar Pahlawan Nasional, pemerintah menganugerahkan lima Bintang Mahaputera Adipradana, dua Bintang Mahaputera Utama, dua Bintang Mahaputera Nararya, satu Bintang Jasa Pratama, satu Bintang Jasa Nararya, dan delapan Bintang Budaya Parama Dharma. ● MUNAWWAROH | SANDY INDRA PRATAMA | FATKHUR ROHMAN TAUFIQ | JOBBIE S